

Analysis of Maritime Intelligence Strategy in Anticipating Threats on Indonesia's Large Islands

Analisis Strategi Intelijen Maritim dalam Mengantisipasi Ancaman di Pulau-Pulau Besar Indonesia

Wahyu Prabudi¹, Supriadi², Rudi Sokabla³

Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut

¹wahyuprabudi54@gmail.com, ²Supriadiacong1308@gmail.com,

³rudysokabla@gmail.com

Abstract

Indonesia, as the world's largest archipelago, faces multidimensional security threats across its five major islands Sumatra, Java, Kalimantan, Sulawesi, and Papua. This study analyzes maritime intelligence strategies for anticipating conventional and non-traditional threats in these regions, identifies weaknesses in the TNI AL (Indonesian Navy) maritime intelligence system, and formulates integrated strategy recommendations. Employing a qualitative descriptive-analytical approach, data were collected through in-depth interviews with five strategic informants from key TNI AL units (Sintela, Pusintela, Sopsal, Puskodal Mabelsal, and Cyberal) and analyzed using NVivo software and SWOT analysis. Findings reveal three structural weaknesses: inter-agency coordination fragmentation, surveillance technology limitations, and human resource gaps. SWOT analysis positions the maritime intelligence strategy in Quadrant I (X=0.665; Y=0.278), recommending an aggressive SO strategy that maximizes HUMINT networks and strategic naval bases to capitalize on AI-big data technology advancement and regional cooperation. Three strategic pillars are proposed: integrated technology-based systems, institutional coordination reform, and community-based intelligence. These findings support the revision of Law No. 17/2011 on State Intelligence and development of a National Maritime Intelligence Fusion Center toward Indonesia's 2045 Golden Vision.

Keywords: *Maritime Intelligence; Hybrid Threats; SWOT Analysis; NVivo; Indonesian Navy; Maritime Security.*

Abstrak

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menghadapi ancaman keamanan multidimensi di lima pulau besar Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Studi ini menganalisis strategi intelijen maritim dalam mengantisipasi ancaman konvensional dan non-tradisional di kawasan-kawasan tersebut, mengidentifikasi kelemahan sistem intelijen maritim TNI AL (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut), serta merumuskan rekomendasi strategi terpadu. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitik kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan lima informan strategis dari satuan-satuan kunci TNI AL (Sintela, Pusintela, Sopsal, Puskodal Mabelsal, dan Cyberal) dan dianalisis menggunakan perangkat lunak NVivo serta analisis SWOT. Temuan penelitian mengungkapkan tiga kelemahan struktural: fragmentasi koordinasi antarlembaga, keterbatasan teknologi pengawasan, dan kesenjangan sumber daya manusia. Analisis SWOT menempatkan strategi intelijen maritim pada Kuadran I (X=0,665; Y=0,278), merekomendasikan strategi SO agresif yang memaksimalkan jaringan HUMINT dan pangkalan angkatan laut strategis guna memanfaatkan kemajuan teknologi AI-big data dan kerja sama regional. Tiga pilar strategis diusulkan: sistem berbasis teknologi terpadu, reformasi koordinasi kelembagaan, dan intelijen berbasis komunitas. Temuan-temuan ini mendukung revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara dan pengembangan Pusat Fusi Intelijen Maritim Nasional menuju Visi Emas Indonesia 2045.

Kata Kunci: Intelijen Maritim; Ancaman Hibrida; Analisis SWOT; NVivo; Angkatan Laut Indonesia; Keamanan Maritim.

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki wilayah laut seluas 6,32 juta km² mencakup laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan landas kontinen. Posisi geografis ini menempatkan pulau-pulau besar seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua di persimpangan Samudra Hindia dan Pasifik jalur perdagangan internasional tersibuk di dunia yang sekaligus menjadikannya pintu gerbang utama berbagai ancaman keamanan bersifat multidimensi.

Dari dimensi konvensional, klaim teritorial dari negara tetangga terus meningkat seiring ekspansi militer di kawasan Indo-Pasifik, khususnya di perairan Natuna Utara yang berhadapan langsung dengan klaim nine-dash line Tiongkok. Di samping itu, ancaman non-tradisional seperti illegal fishing, penyelundupan narkoba dan senjata, terorisme, separatisme di Papua dan Sumatera, serta serangan siber terhadap infrastruktur kritis di Jawa membentuk lanskap ancaman yang semakin kompleks.

Ironisnya, kompleksitas ancaman ini tidak diimbangi oleh kapasitas sistem intelijen nasional yang memadai. Sistem intelijen masih terfragmentasi antara lembaga sipil dan militer (BIN, TNI, dan Polri), sehingga menimbulkan tumpang tindih informasi dan duplikasi data. Keterbatasan teknologi seperti drone dan satelit menghambat pemantauan real-time di wilayah terpencil, sementara integrasi big data dan kecerdasan buatan (AI) untuk analisis prediktif belum dimanfaatkan secara optimal.

Bertolak dari kondisi ini, penelitian mengangkat empat rumusan masalah: (1) bagaimana kerentanan geografis pulau-pulau besar terhadap ancaman konvensional dan non-tradisional; (2) apa kelemahan sistem intelijen maritim TNI AL dan koordinasinya dengan lembaga nasional; (3) bagaimana strategi intelijen maritim terpadu yang efektif; dan (4) bagaimana rekomendasi kebijakan dan upaya penguatan koordinasi antarlembaga. Penelitian ini penting karena secara langsung berkontribusi pada pencapaian visi Indonesia Emas 2045 dan urgensi reformasi UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

2. Tinjauan Pustaka

Teori Intelijen Strategis

Teori Intelijen Strategis berakar pada pemikiran Sherman Kent yang meletakkan fondasi ilmiah intelijen sebagai disiplin tersendiri melalui siklus sistematis: *planning, collection, processing, analysis, dan dissemination* (Kent, 1949). Lowenthal (2019) memperbarui kerangka ini dengan memasukkan dimensi *open-source intelligence* (OSINT) dan analisis ancaman hybrid sebagai komponen wajib intelijen strategis modern. Dalam konteks Indonesia, kerangka ini diadaptasi untuk keperluan *Maritime Domain Awareness* (MDA) yang mencakup integrasi sensor laut, satelit, dan *human intelligence*.

Teori Keamanan Maritim

Geoffrey Till (2018) menyatakan keamanan maritim berpijak pada empat fungsi utama angkatan laut: *military, constabulary, diplomatic, dan benign*. Keempat fungsi Till dipetakan terhadap kapabilitas aktual Satgas Intelijen Maritim Nasional untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi ideal dengan realitas lapangan. Bueger et al. (2019) menegaskan bahwa keamanan maritim memiliki empat karakteristik:

saling terhubung (interconnected), transnasional, liminal, dan lintas yurisdiksi kelembagaan.

Teori SWOT dan Strategi Maritim

Analisis SWOT yang dikembangkan oleh Humphrey di Stanford Research Institute (1960-an) dioperasionalkan dalam penelitian ini melalui pendekatan Wehrich (1982) yang menghasilkan empat strategi turunan: SO, WO, ST, dan WT. Teori Strategi Maritim Mahan (1890) menegaskan bahwa kekuatan laut (sea power) adalah faktor paling krusial dalam menentukan supremasi politik suatu bangsa, relevan penuh bagi Indonesia yang terletak di persimpangan dua samudra.

Penelitian Terdahulu

Kajian bibliometrik Kismartini et al. (2024) terhadap lebih dari 1.200 artikel keamanan maritim terindeks Scopus mengidentifikasi celah riset signifikan pada kajian operasional di negara-negara kepulauan berkembang, terutama yang mengintegrasikan perspektif intelijen strategis. Penelitian Hendrawan (2024) tentang peran intelijen TNI AL di Selat Malaka mengkonfirmasi efektivitas teknologi radar dan surveilans udara. Sutisna dan Rofii (2022) menekankan peran intelijen strategis Bakamla dalam membangun sinergi antarlembaga. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan cakupan lima pulau besar secara komparatif dan kombinasi metodologi NVivo-SWOT yang belum pernah diterapkan sebelumnya dalam konteks intelijen maritim Indonesia.

3. Metode

Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitik sebagaimana direkomendasikan Creswell dan Poth (2018) untuk eksplorasi fenomena yang tidak dapat direduksi ke dalam angka statistik. Desain penelitian berupa desk study dengan wawancara mendalam (in-depth interview), dilaksanakan di Jakarta.

Subjek penelitian adalah lima ahli (expert) yang dipilih secara purposif dari unit kerja strategis TNI AL, berpangkat minimal Perwira Menengah dengan pengalaman minimal lima tahun di bidang intelijen maritim:

Tabel 1. Unit Kerja Subjek Penelitian

No.	Subjek Penelitian	Unit Kerja	Lokasi
1	Pejabat Intelijen Strategis	Staf Intelijen AL (Sintelal)	Jakarta
2	Pejabat Analisis Intelijen Maritim	Pusat Intelijen AL (Pusintelal)	Jakarta
3	Pejabat Perencanaan Operasi Maritim	Staf Operasi AL (Sopsal)	Jakarta
4	Pejabat Komando dan Kendali	Puskodal Mabesal	Jakarta
5	Pejabat Intelijen Siber Maritim	Satuan Siber TNI AL (Cyberal)	Jakarta

Sumber: Olahan Data Peneliti, 2026

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terstruktur dengan dua belas pertanyaan utama yang dibagi dalam empat kelompok sesuai rumusan masalah, diperkuat dengan triangulasi dokumen (regulasi, doktrin, laporan resmi). Analisis data menggunakan software NVivo untuk koding dan kategorisasi tematik, dilanjutkan dengan integrasi ke dalam matriks SWOT mengadaptasi metodologi Purba

et al. (2024). Unit analisis mencakup dimensi individu, kelompok/organisasi, sistem/teknologi, wilayah perairan, dan rentang waktu 2021–2025.

4. Hasil dan Pembahasan

Kerentanan Geografis Pulau-Pulau Besar Indonesia

Analisis NVivo terhadap transkrip wawancara mengidentifikasi kerentanan geografis yang termanifestasi melalui tiga dimensi. Pertama, karakteristik geografis yang menciptakan ancaman konvensional: panjang garis pantai lebih dari 54.000 km di kelima pulau besar menjadikan pengawasan komprehensif melampaui kapasitas saat ini, dengan keterbatasan radar pantai menciptakan blind spots yang aktif dimanfaatkan aktor ancaman.

Sumatera menghadapi kerentanan ganda melalui Selat Malaka yang dilalui lebih dari 90.000 kapal per tahun. Kalimantan memiliki kompleksitas tertinggi dengan perbatasan di tiga sisi. Sulawesi menghadapi ancaman jaringan teroris dari perbatasan Filipina. Papua menghadapi kombinasi separatisme dan keterbatasan infrastruktur pengawasan di perairan seluas 130.000 km². Jawa sebagai pusat pemerintahan menghadapi konsentrasi ancaman siber dan terorisme urban.

Kedua, faktor demografi-ekonomi-sosial-budaya: ketimpangan pembangunan antarpulau menciptakan kerentanan struktural. Kesenjangan ekonomi antara Jawa dan kawasan timur Indonesia menciptakan kondisi yang kondusif bagi rekrutmen jaringan separatisme. Ketiga, ancaman non-tradisional meliputi IUU fishing, penyelundupan narkoba, terorisme transnasional, dan ancaman siber terhadap infrastruktur kritis.

Kelemahan Sistem Intelijen Maritim

Tiga kelemahan struktural teridentifikasi dengan konsistensi tinggi di seluruh narasumber. Pertama, fragmentasi koordinasi antarlembaga: BIN, BAIS TNI, Baintelkam Polri, Bakamla RI, dan satuan intelijen kementerian beroperasi dalam silo-silo informasi tanpa mekanisme berbagi data yang sistematis. NS-01 menggambarkan kondisi ini sebagai 'fragmentasi fatal' yang menyebabkan duplikasi kerja dan hilangnya momentum tindakan preventif.

Kedua, keterbatasan teknologi surveillance: sistem MDA yang dimiliki TNI AL belum terintegrasi komprehensif dengan sistem Bakamla dan KKP. Lebih dari 60% perairan Papua dan Kalimantan Utara tidak tercakup dalam sistem AIS monitoring terpadu. Sistem drone pengawasan masih terbatas jumlahnya dan belum mampu mencakup seluruh wilayah perairan strategis secara bersamaan. Ketiga, keterbatasan SDM: program pendidikan intelijen belum mengintegrasikan aspek teknologi mutakhir seperti analisis big data, OSINT berbasis AI, dan cyber intelligence.

Hasil Analisis NVivo: Word Query dan Visualisasi Frekuensi Tema

Sebagai bagian dari proses analisis menggunakan perangkat lunak NVivo, dilakukan Word Query (kueri kata) terhadap seluruh transkrip wawancara mendalam dengan lima narasumber strategis. Teknik ini menghasilkan visualisasi Word Cloud yang merepresentasikan frekuensi kemunculan kata-kata kunci secara proporsional—semakin besar dan gelap kata tersebut ditampilkan, semakin tinggi intensitas pembahasannya dalam keseluruhan data.



Gambar 1. Word Cloud Hasil NVivo Word Query dari Transkrip Wawancara (n=5 Narasumber)

Hasil Word Query menunjukkan dominasi tiga kluster semantik utama. Kluster pertama—yang ditandai warna oranye dan ukuran paling besar—meliputi kata *koordinasi*, *ancaman*, *intelijen*, *sistem*, *maritim*, dan *intelligence*. Dominasi kata-kata ini mengonfirmasi bahwa isu koordinasi antarlembaga dan manajemen ancaman merupakan inti perhatian seluruh narasumber, konsisten dengan temuan diatas.

Kluster kedua mencakup kata-kata berukuran sedang berwarna gelap, antara lain *kerentanan*, *operasional*, *jaringan*, *komunikasi*, *komando*, *strategi*, *berbasis*, *pulau*, *teknologi*, *komunitas*, dan *Papua*, *Kalimantan*, *Sulawesi*. Kluster ini mencerminkan dimensi geografis dan operasional dari tantangan intelijen maritim, khususnya kebutuhan membangun jaringan komando-komunikasi yang andal di pulau-pulau besar yang menjadi fokus penelitian.

Kluster ketiga terdiri dari kata-kata pendukung berukuran lebih kecil, seperti *siber*, *cyber*, *infrastruktur*, *platform*, *terpadu*, *pelatihan*, *satelit*, *kebijakan*, *radikalisasi*, *fragmentasi*, dan *SDM*. Meskipun frekuensinya lebih rendah, kelompok ini secara kontekstual memperkuat temuan tiga kelemahan struktural yang telah diidentifikasi, yakni keterbatasan teknologi (*siber*, *platform*, *infrastruktur*), kelemahan SDM (*pelatihan*, *sdm*), serta fragmentasi koordinasi. Keseluruhan pola semantik dalam Word Cloud ini menjadi landasan induktif bagi penyusunan matriks SWOT berikut.

Analisis SWOT

Seluruh temuan NVivo diintegrasikan ke dalam matriks SWOT yang mengklasifikasikan faktor internal dan eksternal. Tabel 2 dan Tabel 3 menyajikan hasil IFAS (Internal Factor Analysis Summary) dan EFAS (External Factor Analysis Summary):

Tabel 2. Internal Faktor SWOT (IFAS)

Kode	Faktor	Bobot	Rating	Skor
S1	Jaringan HUMINT maritim luas di pulau-pulau besar	0,167	4	0,668
S2	Pengalaman operasi intelijen TNI AL di wilayah ZEE	0,111	3	0,333

S3	Dukungan doktrin negara kepulauan dan poros maritim dunia	0,111	3	0,333
S4	Infrastruktur pangkalan laut strategis di pulau besar	0,111	3	0,333
W1	Fragmentasi koordinasi antar lembaga intelijen maritim	0,167	2	0,334
W2	Keterbatasan sarana drone, satelit, dan radar MDA	0,167	2	0,334
W3	Sistem big data dan AI intelijen belum terintegrasi	0,111	2	0,222
W4	Prosedur berbagi informasi lambat dan birokratis	0,056	2	0,112

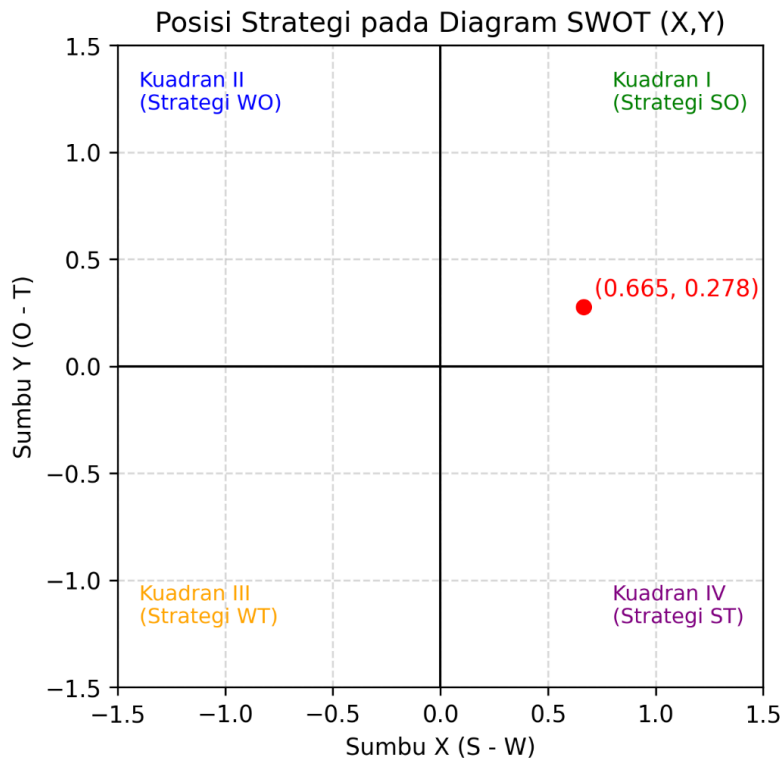
Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2026

Tabel 3. Eksternal Faktor SWOT (EFAS)

Kode	Faktor	Bobot	Rating	Skor
O1	Kemajuan teknologi AI, big data dan MDA maritim	0,167	4	0,668
O2	Perhatian pemerintah pada keamanan maritim	0,111	3	0,333
O3	Kerja sama intelijen regional Indo-Pasifik dan ASEAN	0,111	3	0,333
O4	Agenda Indonesia Emas 2045 & modernisasi pertahanan	0,111	3	0,333
T1	Illegal fishing & kejahatan maritim lintas negara	0,167	3	0,501
T2	Rivalitas kekuatan besar di Indo-Pasifik	0,111	3	0,333
T3	Ancaman siber terhadap infrastruktur intelijen maritim	0,111	2	0,222
T4	Separatisme & terorisme memanfaatkan celah maritim	0,111	3	0,333

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2026

Perhitungan posisi SWOT: Sumbu X (internal) = $S - W = 1,667 - 1,002 = 0,665$; Sumbu Y (eksternal) = $O - T = 1,667 - 1,389 = 0,278$. Koordinat (0,665; 0,278) menempatkan strategi pada Kuadran I (Growth/Agresif - Strategi SO).



Gambar 2. Diagram Posisi Kuadran SWOT
 Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2026

Tabel 4. Matriks Strategi SWOT

	STRENGTHS (S)	WEAKNESSES (W)
OPPORTUNITIES (O)	Strategi SO: Integrasi HUMINT & MDA nasional berbasis AI-big data; modernisasi intelijen maritim dalam kerangka Indonesia Emas 2045; pembangunan hub data intelijen di pangkalan strategis; penguatan MDA berbasis kerja sama ASEAN/Indo-Pasifik	Strategi WO: Platform koordinasi terpadu BIN-BAIS-Baintelkam-Bakamla-TNI AL; prioritas pengadaan drone, satelit, dan radar MDA; National Maritime Intelligence Fusion Center; capacity building via kerja sama teknis regional
THREATS (T)	Strategi ST: Optimalisasi HUMINT nelayan/agen lokal untuk interdiksi illegal fishing & terorisme; konsep operasi intelijen di Natuna & Indo-Pasifik; integrasi siklus intelijen dengan pengamanan siber; operasi kontra separatisme berbasis MDA	Strategi WT: Reformulasi SOP koordinasi lintas lembaga; hardening infrastruktur teknologi intelijen; joint SOP berbagi informasi & rotasi penugasan lintas lembaga; program pelatihan terpadu guna mengurangi hambatan birokrasi

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2026

Pembahasan.

Konsistensi Temuan NVivo dengan Struktur SWOT

Hasil pengolahan data menggunakan NVivo menghasilkan kluster tema yang secara substansial sejalan dengan empat dimensi SWOT. Node tematik seperti HUMINT lokal, pangkalan strategis, fragmentasi kelembagaan, keterbatasan teknologi, dinamika ancaman maritim, dan peluang modernisasi pertahanan muncul berulang dalam wawancara dan dokumen kebijakan. Pola ini menunjukkan bahwa indikator SWOT yang disusun bukan sekadar asumsi normatif, melainkan berasal dari pola naratif empiris yang konsisten, sehingga meningkatkan validitas konseptual dari matriks SWOT yang dihasilkan.

Strategi Intelijen Maritim Terpadu

Posisi Kuadran I merekomendasikan strategi agresif berbasis tiga pilar: Pertama, sistem terpadu berbasis teknologi—integrasi platform AI, big data analytics, dan satellite imagery untuk membangun Pusat Komando dan Pengendalian Intelijen Maritim Terpadu (PKPIMT) yang mampu melakukan pattern recognition terhadap anomali aktivitas maritim secara real-time. Platform Secure Information Sharing Network yang menghubungkan seluruh lembaga intelijen melalui jaringan komunikasi terenkripsi menjadi infrastruktur kritis.

Kedua, koordinasi kelembagaan—pembentukan Joint Intelligence Center (JIC) sebagai satu komando operasional terpadu di bawah koordinasi Kemenko Polhukam. JIC akan mengeliminasi tumpang tindih kewenangan, memastikan diseminasi informasi yang cepat, dan menciptakan unified intelligence picture untuk pengambilan keputusan strategis. Penetapan lead agency per kategori ancaman diperlukan: TNI AL untuk ancaman konvensional, Bakamla untuk penegakan hukum maritim, BNN untuk ancaman narkoba.

Ketiga, intelijen berbasis komunitas—program pemberdayaan masyarakat nelayan, tokoh adat, dan pemerintah daerah sebagai jaringan 'mata dan telinga' intelijen maritim. Formalisasi program nelayan informan dengan perlindungan hukum dan kompensasi yang memadai, serta pembentukan Forum Komunikasi Keamanan Maritim (FKKM) di setiap kabupaten pesisir, akan secara dramatis memperluas jangkauan deteksi dini ke wilayah yang tidak terjangkau teknologi.

Implikasi Kebijakan

Penelitian merekomendasikan revisi UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara untuk mengakomodasi kebutuhan platform digital terpadu berbasis AI. Pembangunan National Maritime Intelligence Fusion Center yang mengintegrasikan OSINT, HUMINT, SIGINT, dan IMINT dalam satu platform analitik merupakan langkah strategis jangka menengah. Dalam jangka pendek, reformulasi SOP koordinasi yang mengikat secara hukum bukan sekadar MOU—diperlukan untuk memastikan kepatuhan dalam kondisi tekanan operasional. Doktrin Eka Sasana Jaya TNI AL juga perlu diperbarui untuk mencerminkan realitas ancaman maritim kontemporer termasuk cognitive electronic warfare dan cyber intelligence.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menghasilkan lima kesimpulan utama. Pertama, sistem intelijen maritim TNI AL di pulau-pulau besar sudah memiliki landasan kelembagaan yang

jelas, namun masih menghadapi keterbatasan dalam implementasi operasional. Kedua, kerentanan geografis Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua belum sepenuhnya terantisipasi oleh postur intelijen yang ada, dengan celah deteksi dini terhadap ancaman konvensional maupun non-tradisional. Ketiga, kapabilitas teknologi MDA, radar, AIS, UAV, dan platform berbasis AI terus berkembang namun pemanfaatannya belum optimal akibat fragmentasi antarlembaga.

Keempat, analisis NVivo-SWOT memperlihatkan bahwa intelijen maritim TNI AL berada pada posisi relatif kuat secara internal (skor $S=1,667 > W=1,002$) dengan peluang eksternal yang besar (skor $O=1,667 > T=1,389$), sehingga strategi yang paling tepat adalah strategi agresif SO. Kelima, diperlukan penguatan sistem intelijen maritim yang terpadu dan berteknologi maju, responsif terhadap karakteristik masing-masing pulau besar, guna mendukung Strategi Pertahanan Laut Nasional dan ketahanan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

6. Daftar Pustaka

- Bueger, C., Edmunds, T., & Ryan, B. J. (2019). *Maritime security: The uncharted politics of the global sea*. Palgrave Macmillan.
- Conboy, K. (2004). *Intel: Inside Indonesia's intelligence service*. Equinox Publishing.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Hendrawan, C. (2024). Analisis pengaruh peran intelijen TNI Angkatan Laut dalam mendukung keamanan laut di Selat Malaka. *Jurnal Multidisiplin Indonesia (JOURMI)*, 2(2).
- Humphrey, A. S. (1960). *SWOT analysis: A tool for making better decisions*. Stanford Research Institute.
- Jackson, K., & Bazeley, P. (2019). *Qualitative data analysis with NVivo* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Kent, S. (1949). *Strategic intelligence for American world policy*. Princeton University Press.
- Kismartini, Murtadho, I., Riszka Sabilla, & Ali Roziqin. (2024). A bibliometric analysis of maritime security policy: Research trends and future agenda. *Maritime Policy & Management*.
- Kuswara, Y. B. (2019). Evaluasi fungsi kontra-intelijen Indonesia dalam menghadapi spionase intelijen asing. *Jurnal Kajian Strategi Ketahanan Nasional*, 2(2).
- Lowenthal, M. M. (2019). *Intelligence: From secrets to policy* (8th ed.). CQ Press.
- Mahan, A. T. (1890). *The influence of sea power upon history, 1660–1783*. Little, Brown and Company.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Prakoso, L. Y. (2021). *Metode SWOT AHP dalam merencanakan strategi pertahanan*. CV Aksara Global Akademia.
- Purba, et al. (2024). Integrasi analisis NVivo-SWOT dalam penelitian kebijakan keamanan maritim. *Jurnal Pertahanan Nasional*.
- Sutisna & Rofii. (2022). Intelijen strategis Bakamla RI dalam melaksanakan kolaborasi institusi keamanan maritim untuk ketahanan nasional. *Jurnal Intelijen Nasional*.
- Till, G. (2018). *Seapower: A guide for the twenty-first century* (4th ed.). Routledge.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Prabudi, dkk (2026)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Wehrich, H. (1982). The TOWS matrix: A tool for situational analysis. *Long Range Planning*, 15(2), 54-66.